

## Hadis Nabi tentang Kepemimpinan: Prinsip Etis dalam Mencegah Otoritarianisme

**Widya Utami\***

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: [widyautami1@gmail.com](mailto:widyautami1@gmail.com)

### Article History

Received: 13,  
Maret, 2025

Revised: 19 Mei,  
2025

Accepted: 26, Juni,  
2025

Available Online:  
23, Juli, 2025

**Abstrak:** Artikel ini bertujuan menganalisis hadis-hadis yang menyinggung tentang kepemimpinan dan larangan bersifat otoriter untuk menemukan prinsip etis yang relevan bagi diskursus politik Islam kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) yang mengacu pada sumber primer berupa kitab hadis kanonik seperti Sahih Muslim dan Sunan at-Tirmidzi, serta sumber sekunder berupa literatur akademik dan artikel jurnal terindeks Scopus. Analisis dilakukan dengan metode deskriptif-analitis dan analisis tematik guna menggali nilai-nilai normatif hadis serta relevansinya dengan kepemimpinan modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis-hadis tersebut memberikan fondasi etika kepemimpinan yang menolak praktik otoritarianisme dan menekankan akuntabilitas, keadilan, serta orientasi pada kemaslahatan umat. Kontribusi penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan ajaran profetik dengan wacana kepemimpinan kontemporer, sehingga memperkuat landasan etis-politik Islam dalam menghadapi tantangan otoritarianisme di era modern.

**Kata Kunci:** *Hadis Kepemimpinan; Etika; Otoritarianisme.*

**Abstract:** This article aims to analyze hadiths related to leadership and the prohibition of authoritarianism in order to identify ethical principles relevant to contemporary Islamic political discourse. Employing a qualitative approach through library research, this study draws on primary sources from canonical hadith collections such as Sahih Muslim and Sunan at-Tirmidhi, complemented by secondary sources from academic literature and Scopus-indexed journals. Data were examined using descriptive-analytical and thematic analysis to extract normative values and contextualize them within modern leadership frameworks. The findings reveal that the Prophetic traditions establish an ethical foundation that rejects authoritarianism and highlight the leader's duty to uphold justice, accountability, and communal welfare. This study contributes to the integration of Prophetic guidance into contemporary leadership discourse, providing an ethical-political framework for addressing authoritarian challenges in modern governance.

**Keywords** *Leadership Hadith; Ethics; Authoritarianism.*

## Pendahuluan

Kepemimpinan dalam Islam merupakan amanah besar yang memiliki implikasi spiritual, sosial, dan politik. Rasulullah menegaskan bahwa setiap pemimpin adalah penggembala (ra'in) dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya. Hadits-hadits tentang kepemimpinan mengandung prinsip moral yang mendalam, di antaranya peringatan keras agar pemimpin tidak bersikap zalim dan otoriter. Fenomena kepemimpinan yang hanya menuntut hak, tetapi abai terhadap kewajiban, sudah diantisipasi sejak awal oleh Rasulullah melalui berbagai sabda yang mendorong ketaatan kepada pemimpin, sekaligus membatasi ruang penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, kepemimpinan Islam tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berlandaskan nilai etika dan tanggung jawab ukhrawi.

Dalam realitas kontemporer, problem kepemimpinan otoriter masih sering muncul di berbagai level pemerintahan maupun organisasi. Otoritarianisme menyebabkan kesenjangan antara pemimpin dan masyarakat, menumbuhkan krisis kepercayaan, serta melahirkan budaya politik yang represif. Islam sebagai agama rahmatan lil-'alamin menawarkan prinsip dasar kepemimpinan yang humanis, akuntabel, dan partisipatif. Hadits Nabi tentang larangan bersikap otoriter menjadi relevan untuk dikaji kembali, terutama ketika kepemimpinan modern dihadapkan pada tantangan demokratisasi, good governance, dan penegakan keadilan sosial.

Kajian akademik mengenai kepemimpinan Islam telah banyak dilakukan, baik dalam perspektif fiqh siyasah, tasawuf, maupun pemikiran politik Islam. Namun, kajian yang secara spesifik menelaah teks-teks hadis tentang larangan otoritarianisme masih terbatas, terutama dalam kaitannya dengan problem kepemimpinan kontemporer. Di sinilah letak kebaruan (novelty) kajian ini, yaitu menghubungkan sumber normatif hadis dengan tantangan praktik kekuasaan modern. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya membahas hadis dalam tataran normatif, tetapi juga menghadirkannya sebagai kerangka etika dalam mengelola kepemimpinan yang lebih adil dan berorientasi pada kemaslahatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis hadis-hadis Nabi yang menekankan pentingnya kepemimpinan yang adil, larangan bersikap otoriter, serta konsekuensi moral yang melekat pada amanah kekuasaan. Analisis ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah terhadap diskursus Islamic leadership dalam ranah akademik, sekaligus menghadirkan perspektif etika Islam sebagai alternatif solusi atas problem kepemimpinan yang cenderung elitis dan otoriter. Dengan pendekatan normatif-teologis yang berpadu dengan analisis sosial, penelitian ini dapat memperkaya wacana kepemimpinan Islami yang lebih relevan dalam konteks global saat ini.

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada analisis teks hadis-hadis Nabi terkait kepemimpinan dan larangan bersikap otoriter. Sumber primer penelitian ini adalah kitab-kitab hadis kanonik, khususnya *Sahih Muslim* dan *Sunan at-Tirmidzi*, yang memuat hadis mengenai amanah kepemimpinan, larangan meminta jabatan, serta kewajiban pemimpin bersikap adil. Sumber sekunder berupa literatur ilmiah seperti buku, jurnal terindeks Scopus, dan penelitian terdahulu digunakan untuk memperkaya perspektif teoretis dan kontekstual dalam menafsirkan hadis.

Analisis data dilakukan melalui metode deskriptif-analitis dengan langkah-langkah kritik sanad dan matan secara ringkas untuk memastikan keotentikan hadis yang dirujuk, kemudian dilanjutkan dengan analisis tematik (*thematic analysis*) guna menemukan nilai-nilai etika kepemimpinan yang terkandung. Selanjutnya, hadis-hadis tersebut dikontekstualisasikan dengan teori kepemimpinan Islam kontemporer dan tantangan otoritarianisme dalam politik modern, sehingga menghasilkan pemahaman yang relevan baik secara normatif maupun praktis.

## Hasil dan Pembahasan

### Hadits Tentang Hukumannya Bagi Pemimpin Yang Menipu Rakyatnya

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ دَخَلَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ عَلَى مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ وَهُوَ وَجِعٌ فَسَأَلَهُ فَقَالَ إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا لَمْ أَكُنْ حَدِّثُكَهُ إِنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَسْتَرْعِي اللَّهُ عَبْدًا رَعِيَّةً يَمُوتُ جِبِينَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لَهَا إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ قَالَ أَلَا كُنْتَ حَدِّثْتَنِي هَذَا قَبْلَ الْيَوْمِ قَالَ مَا حَدِّثْتُكَ أَوْ لَمْ أَكُنْ لِأَحَدٍكَ وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَاءَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ يَعْقُوبٍ عَنِ زَائِدَةَ عَنْ هِشَامِ قَالَ قَالَ الْحَسَنُ كُنَّا عِنْدَ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ نَعُودُهُ فَجَاءَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ فَقَالَ لَهُ مَعْقِلُ إِنِّي سَأَحْدِثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِهِمَا

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Yazid bin Zura'i dari Yunus dari al-Hasan dia berkata, "Ubaidullah bin Ziyad mengunjungi Ma'qal bin Yasar yang sedang sakit. Ubaidullah kemudian memminta sebuah hadits, maka Ma'qil pun berkata: "Aku akan menyampaikan sebuah hadits yang belum pernah aku sampaikan kepadamu. Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: "Tidaklah Allah ta'ala menyerahkan suatu urusan rakyat kepada seorang hamba lalu ketika menjelang ajalnya dia masih saja berkhianat kepadanya melainkan Allah pasti akan mengharamkan surga atasnya." Ubaidullah berkata, "Bukankah kemarin kamu telah menyampaikan hadits ini kepadaku?. Ma'qil menjawab, 'Aku belum pernah menyampaikan hadits ini kepadamu. Dan telah menceritakan kepadaku al-Qasim bin Zakariya telah menceritakan kepada kami Husain yakni al-Ja'fiy dari Zaidah dari Hisyam dia berkata, al-Hasan berkata, 'Ketika kami sedang menjenguk Ma'qil bin Yasar datanglah Ubaidullah bin Ziyad. Ma'qil lalu berkata kepadanya, 'Aku akan menyampaikan sebuah hadits yang aku dengar dari Rasulullah saw..kemudian dia menyebutkan sebuah hadits yang semakna dengan hadits mereka berdua. (HR. Sahih Muslim: 204).*

Kejujuran adalah modal yang paling mendasar dalam sebuah kepemimpinan. Tanpa kejujuran, kepemimpinan ibarat bangunan tanpa fondasi, dari luar nampak megah namun di dalamnya rapuh dan tak bisa bertahan lama. Begitu pula dengan kepemimpinan, bila tidak didasarkan atas kejujuran orang-orang yang terlibat di dalamnya, maka jangan harap kepemimpinan itu akan berjalan dengan baik. Namun kejujuran di sini tidak bisa hanya mengandalkan pada satu orang saja, kepada

pemimpin saja misalkan. Akan tetapi semua komponen yang terlibat di dalamnya, baik itu pemimpinnya, pembantunya, staf-stafnya, hingga struktur yang paling bawah dalam kepemimpinan ini, semisal tukang sapunya, harus menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Hal itu karena tidak sedikit dalam sebuah kepemimpinan, atau sebuah organisasi, terdapat pihak yang jujur namun juga terdapat pihak yang tidak jujur. Bila pemimpinnya jujur namun staf-stafnya tidak jujur, maka kepemimpinan itu juga akan rapuh. Begitu pula sebaliknya.

Namun secara garis besar, yang sangat ditekankan dalam hadis ini adalah seorang pemimpin harus memberikan suri tauladan yang baik kepada pihak-pihak yang dipimpinnya. Suri tauladan ini tentunya harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan pemimpin yang tidak menipu dan melukai hati rakyatnya. Pemimpin yang menipu dan melukai hati rakyat, dalam hadis ini disebutkan, diharamkan oleh Allah untuk menginjakkan kaki di surga. Meski hukuman ini nampak kurang kejam, karena hanya hukuman di akhirat dan tidak menyertakan hukuman di dunia, namun sebenarnya hukuman “haram masuk surga” ini mencerminkan betapa murkanya Allah terhadap pemimpin yang tidak jujur dan suka menipu rakyat.

Dalam hadits ini, Rasulullah saw. mengungkapkan dengan redaksi penafian (kata *mâ*) yang dilanjutkan dengan pengecualian (kata *illâ*) untuk menetapkan. Ini memberi pengertian, tidak ada seorang pun yang memenuhi deskripsi hadis ini kecuali pasti menghadapi akibat yang dijelaskan dalam hadis ini. Makna *yastar’ihillâhu ra’iyyat[an]* maksudnya, Allah mendelegasikan pengaturan urusan rakyat kepada dia, dengan menobatkan dia untuk mengurus berbagai kemaslahatan rakyat dan mengendalikan urusan mereka. *Ar-Râ’iy* adalah penjaga yang diberi amanah atas pengaturan urusan rakyat.

Kata *ghâsyy[in]* maknanya *khâ’in* (khianat) atau *khâdi’* (penipu). Artinya, dia mengelabui rakyat atau mengkhianati amanah yang dipercayakan kepada dirinya untuk mengurus urusan rakyat, memelihara berbagai kemaslahatan rakyat dan semua kewajiban dan tanggung jawab ri’ayah. Frasa *yawma yamûtu wa huwa ghâsyy[in]* bermakna: saat ajal menghampiri dia dan tobat sudah tidak lagi bisa diterima, sementara pada waktu itu dia seorang *ghâsyy[in]*.

Adapun sabda Rasulullah saw, *illâ harramallâh ‘alayhi al-jannata*, maksudnya dijelaskan dalam riwayat lain: *lam yadkhul ma’ahum al-jannata* (tidak masuk surga bersama mereka). Artinya, dia tidak masuk surga bersama rakyatnya yang masuk surga, sebab dia harus mendapat hukuman karena mengkhianati amanah ri’ayah itu. Jadi, maknanya bukan dia kekal di neraka. Jadi, hadis ini seperti dijelaskan oleh Ibn Bathal di dalam Syarh Ibn Bathal, merupakan penjelasan dan ancaman keras terhadap para pemimpin keji (*a’immah al-jûr*). Jadi, siapa yang menelantarkan orang-orang yang urusan mereka Allah percayakan kepada dia atau dia mengkhianati mereka atau menzalimi mereka, maka kepada dia diarahkan tuntutan atas kezaliman-kezaliman terhadap hamba pada Hari Kiamat kelak.

Qadhi ‘Iyadh mengatakan seperti dikutip oleh an-Nawawi di dalam Syarh Shahîh Muslim li an-Nawawi, “Maknanya jelas dalam hal peringatan dari menipu (mengkhianati) kaum Muslim, peringatan untuk orang yang kepada dia didelegasikan sesuatu dari urusan mereka, dia diminta mengurus mereka dan dia diangkat untuk mengurus kemaslahatan mereka dalam hal agama dan dunia mereka. Jika dia berkhianat dalam apa yang dipercayakan (diamanahkan) kepada

dia dan dia tidak menasihati dalam apa yang didelegasikan kepada dia yang kadang itu dengan tidak memberitahu mereka apa yang harus mereka pegang teguh dan mereka ambil dari agama mereka, dan kadang dengan tidak melakukan apa yang telah ditentukan untuknya berupa menjaga syariah mereka dan membela/mempertahankan syariah dari setiap penentang yang akan memasukkan sesuatu di dalamnya atau memalingkan makna-maknanya, atau mengabaikan hudud mereka, atau menelantarkan hak-hak mereka atau tidak melindungi/ menjaga apa yang mereka peroleh dan tidak menghadapi musuh-musuh mereka, atau meninggalkan langkah keadilan di tengah mereka, maka sungguh dia telah menipu mereka.” Qadhi ‘Iyadh mengatakan, “Sungguh Allah SWT telah memperingatkan bahwa hal demikian termasuk dosa besar yang berakibat menjauhkan dari surga. *WalLah a’lam.*”

Al-Amir ash-Shan’ani di dalam *Subul as-Salâm* menjelaskan, “Sabda Rasul saw., ‘*yawma yamûtu* (hari ketika dia mati),’ maksudnya bahwa dia dihampiri kematian dalam keadaan menipu rakyatnya tanpa bertobat dari hal itu. Al-Ghisyyu adalah lawan dari an-nushhu (nasihat). Ghisyyu itu terjadi dengan kezaliman dia terhadap rakyat dengan mengambil harta mereka, menumpahkan darah mereka, melanggar kehormatan mereka, menghalangi diri dari keperluan dan kebutuhan mereka, menahan dari mereka harta Allah SWT yang Allah tetapkan menjadi milik mereka yang ditentukan untuk pengeluaran-pengeluaran, tidak memberitahu mereka apa yang wajib atas mereka baik perkara agama dan dunia mereka, mengabaikan hudud, tidak menghalangi orang-orang yang membuat kerusakan, menelantarkan jihad dan lainnya yang di dalamnya terdapat kemaslahatan hamba. Termasuk dalam hal itu adalah mengangkat orang yang tidak melingkupi mereka dan tidak memperhatikan perintah Allah tentang mereka dan mengangkat orang yang mana Allah lebih meridhai orang lainnya. Padahal orang lain yang lebih diridhai oleh Allah itu ada. Banyak hadis menunjukkan keharaman al-ghisyyu (penipuan/khianat) dan bahwa itu termasuk dosa besar karena adanya ancaman terhadap al-ghisyyu itu sendiri.”

### **Hadits Tentang Larangan Bersifat Otoriter**

Bila hadis sebelumnya berbicara soal kepemimpinan yang buruk, dalam hadis ini kita kembali menyoroti model kepemimpinan namun lebih spesifik, yaitu kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan otoriter adalah sebuah kepemimpinan yang dijalankan atas dasar kesewenang-wenangan. Semua keputusan dan kebijakan pemimpin harus ditaati oleh semua rakyat tanpa memberi ruang terjadinya “negoisasi” dengan rakyat. Bila pemimpin berkata merah, maka rakyat harus mengikuti merah. Demikianlah ciri-ciri sederhana sebuah kepemimpinan otoriter.

Lalu bagaimana Islam menyikapi kepemimpinan yang otoriter ini? Islam jelas tidak pernah memberikan tempat, walau sejengkal, kepada pemimpin yang otoriter ini. Sebagaimana pemimpin yang dzalim, pemimpin otoriter juga diancam dengan hukuman neraka. Dan sebaliknya, Islam justru sangat menekankan pentingnya demokrasi dan partisipasi rakyat dalam sebuah sistem kepemimpinan. Rasul s.a.w telah memberikan contoh bagaimana syura menjadi prinsip pokok dalam menjalankan roda kepemimpinan. Dalam syura (demokrasi) semua rakyat, tanpa membedakan latar agama, etnis, warna kulit, bahasa, jenis kelamin, berhak untuk terlibat dalam merumuskan arah dan haluan sebuah kepemimpinan. Ketika

rasul menjadi pemimpin politik di madinah, rasul tidak segan-segan memberikan hak yang setara antara kaum muhajirin dan anshar. Bahkan dalam medan peperangan, Siti 'Aisyah juga diberi hak untuk mengukuti bahkan memimpin sebuah peperangan dengan kaum kafir. Dengan demikian, cukup jelas sekali bahwa Islam adalah agama yang “mengharamkan” otoritarianisme dan “mewajibkan” demokrasi (syura).

أَنَّ عَائِذَ بْنَ عَمْرٍو وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ فَقَالَ أَيُّ بَنِي إِبْنِي سَمِغْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنْ شَرَّ الرَّعَاءِ الْخَطْمَةُ فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ فَقَالَ لَهُ اجْلِسْ فَإِنَّمَا أَنْتَ مِنْ نُخَالَةٍ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَهَلْ كَانَتْ لَهُمْ نُخَالَةٌ إِنْ مَا كَانَتْ النُّخَالَةُ بَعْدَهُمْ وَفِي غَيْرِهِمْ

Artinya : *'Aidz bin amru r.a, ketika ia masuk kepada ubaidillah bin ziyad berkata: hai anakku saya telah mendengar rasulullah saw bersabda: sesungguhnya sejahat-jahat pemerintah yaitu yang kejam (otoriter), maka janganlah kau tergolong daripada mereka. (HR. Bukhari, Muslim).*

Kepemimpinan otoriter atau bisa disebut kepemimpinan otokratis atau kepemimpinan diktator adalah suatu kepemimpinan dimana seorang pemimpin bertindak sebagai diktator, pemimpin adalah penguasa, semua kendali ada di tangan pemimpin. Seorang diktator jelas tidak menyukai adanya meeting, rapat apalagi musyawarah karena bagi seorang diktator tidak menghendaki adanya perbedaan dan pastinya suka dengan memaksakan kehendaknya.

Dengan kepemimpinan diktator semua kebijakan ada di tangan pemimpin, semua keputusan ada di tangan pemimpin, semua bentuk hukuman, larangan peraturan dapat juga berubah sesuai dengan suasana hati pemimpin. Jika kita lihat dari sisi gaya kepemimpinan secara ekstrim kepemimpinan otoriter menempati urutan pertama karena kita lihat dari seberapa besar pengaruh atau campur tangan pemimpin.

حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ حَنْشٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الأَخْرِ فَسَوْفَ تُدْرِي كَيْفَ تَقْضِيهَا عَلَيَّ فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ

Artinya : *"Apabila ada dua orang mengajukan suatu perkara kepadamu, maka janganlah engkau memutuskan untuk orang pertama sebelum engkau mendengar perkataan orang kedua, niscaya engkau akan mengetahui bagaimana engkau memutuskan perkara itu." Ali berkata: "Sejak itu aku terus menjadi hakim (qāḍī)." (HR. Turmudzi)*

Hadis ini mengajarkan kita sebuah kepemimpinan yang mau mendengar semua suara rakyat. Tidak peduli rakyat itu pengemis, pemulung, orang penyandang cacat, perempuan, atau anak kecil sekalipun, maka semua itu harus didengar suaranya oleh pemimpin. Artinya, kepemimpinan itu, atau lebih tepatnya seorang pemimpin itu harus benar-benar aspiratif. Karena bila kita dalam mengambil keputusan atau kebijakan hanya berdasarkan suara kelompok tertentu, lebih-lebih suara kelompok yang dekat dengan lingkungan kekuasaan (pemimpin) maka keputusan itu pasti akan jauh dari rasa keadilan. Alasannya adalah karena suara satu kelompok itu belum tentu mewakili suara kelompok yang lain. Sehingga bila ingin mencapai rasa keadilan bagi seluruh rakyat, maka harus mendengar suara semua rakyat.

Hadis ini penting terutama dalam konteks sistem demokrasi yang meniscayakan keterwakilan seperti di Indonesia misalkan. Dimana DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) memiliki wewenang untuk mewakili suara rakyat. Bila DPR ini

tidak menjaring aspirasi dari semua lapisan dan status masyarakat, maka jangan harap kebijakan-kebijakan yang dihasilkannya akan memenuhi rasa keadilan rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, agar rasa keadilan dalam sebuah masyarakat itu benar-benar terpenuhi, maka Islam mewajibkan seorang pemimpin untuk tidak mengambil keputusan hanya dari satu orang (satu kelompok suara), tetapi lebih dari itu.

يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَ عَلَيْنَا أَمْرًا يُسْأَلُونَا حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُونَا: سَأَلَ سَلْمَةُ بْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِيُّ رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِلُوا، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِلْتُمْ»: فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ حَقًّا، فَمَا تَأْمُرُنَا؟  
Artinya : *Abu hunaidah (wa'il) bin hadjur r.a. Berkata : salamah bin jazid alджу'fy bertanya kepada rasulullah saw : ya rasulullah, bagaimana jika terangkat diatas kami kepala-kepala yang hanya pandai menuntut haknya dan menahan hak kami, maka bagaimanakah kau menyuruh kami berbuat? Pada mulanya rasulullah mengabaikan pertanyaan itu, hingga ditanya kedua kalinya, maka rasulullah saw bersabda : dengarlah dan ta'atlah maka sungguh bagi masing-masing kewajiban sendiri-sendiri atas mereka ada tanggung jawab dan atas kamu tanggung jawabmu* (HR. Muslim).

Rakyat memiliki hak dan pemimpin memiliki tanggung jawab. Begitu pula sebaliknya, rakyat memiliki tanggung jawab dan pemimpin juga memiliki hak. Antara keduanya harus ada keseimbangan dan kesetaraan. Yang satu tidak boleh mendominasi yang lain. Akan tetapi kekuasaan sepenuhnya adalah tetap berada di tangan rakyat. Karena hakekat kepemimpinan hanyalah amanat yang harus diemban oleh seorang pemimpin. Bila sang pemimpin tidak bisa menjaga amanat itu dengan baik, maka kekuasaan kembali berada di tangan rakyat.

Oleh sebab itu, mengingat kesetaraan posisi rakyat dan pemimpin ini, maka masing-masing memiliki hak dan tanggung jawabnya. Hadis di atas menjelaskan bahwa seorang pemimpin jangan hanya bisa memenuhi haknya, dan mengebiri hak rakyatnya, akan tetapi seorang pemimpin harus mengakui dan menjamin hak-hak rakyatnya secara bebas.

Dalam kehidupan modern seperti sekarang ini, mungkin kita sudah mengenal konsep hak azasi manusia (HAM). Oleh sebab itu, bila kita tarik hadis di atas dalam konteks saat ini, maka sebenarnya nabi Muhammad s.a.w jauh sebelumnya sudah mengajarkan prinsip-prinsip HAM dalam kehidupan politik rakyatnya. Betapa tidak, dari hadis di atas dapat kita gali sebuah pesan bahwa Islam menjamin HAM termasuk di dalamnya hak-hak sipil dan politik (isipol) dan hak-hak ekonomi sosial dan budaya (ekosob). Karena itu, bila seorang pemimpin tidak menjamin hak-hak azasi manusia (HAM) warganya, maka pemimpin itu telah keluar dari sunnah Rasulullah s.a.w.

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّي أَرَاكَ ضَعِيفًا، وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي، لَا تَأْمُرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ، وَلَا تَوْلَيْنِ مَالَ يَتِيمٍ»  
Artinya : *Abu dzar r.a. Berkata : rasulullah saw bersabda : ya abu dzar saya melihat kau seorang yang lemah, dan saya suka bagi dirimu apa yang saya suka bagi diriku sendiri, jangan menjadi pemimpin walau terhadap dua orang, dan jangan menguasai harta anak yatim.* (HR. Muslim)

Hadis ini menerangkan kepada kita bahwa jabatan sebagai pemimpin itu sangat berat, hingga Rasulullah s.a.w menganjurkan salah seorang sahabat untuk, kalau bisa, tidak menjadi pemimpin walau hanya terhadap dua orang. Akan tetapi pesan yang paling menonjol dari hadis di atas adalah bahwa godaan terberat bagi seorang pemimpin adalah menguasai harta anak yatim. Tentunya, anak yatim di sini adalah

salah satu contoh yang merepresentasikan sebuah kelompok masyarakat yang paling lemah. Di luar anak yatim, kita juga bisa menyaksikan orang-orang lemah yang lain, seperti, janda tua, anak-anak terlantar, pengemis, buruh, petani gurem, pengangguran, dsb, yang semua itu menjadi tanggung jawab pemimpin untuk melindunginya, bukan untuk menguasainya. Lantas muncul pertanyaan, bagaimana kita menguasai harta mereka, la wong mereka aja tidak punya harta?

Yang dimaksud menguasai harta mereka ini bukan berarti kita mengambil alih harta kekayaan mereka, melainkan tindakan mengeksploitasi keberadaan mereka untuk kemudian dijual sehingga menghasilkan uang juga termasuk menguasai harta mereka. Selain itu, kebijakan yang tidak berpihak terhadap kaum miskin dan anak yatim ini juga termasuk dalam menguasai harta mereka. Bukankah di dalam harta kita terdapat sebagian harta mereka? Sehingga kita wajib menyisihkan sebagian harta kita untuk kepentingan mereka. Oleh sebab itu, bila kita maknai hadis di atas secara global, maka pesan pokok yang hendak disampaikan adalah, bahwa islam sangat melarang seorang pemimpin mengeksploitasi rakyat kecil, bahkan islam mendorong pemimpin untuk melindungi mereka, karena mereka merupakan bagian dari tanggung jawab pemimpin.

## Penutup

Hadis-hadis Nabi tentang kepemimpinan menegaskan bahwa kekuasaan dalam Islam adalah amanah yang penuh tanggung jawab, bukan sarana untuk menindas atau bersikap otoriter. Pesan moral yang terkandung di dalamnya adalah pentingnya seorang pemimpin memiliki kapasitas, keadilan, dan integritas dalam menjalankan tugasnya. Larangan kepada individu yang lemah untuk memegang jabatan serta peringatan agar pemimpin tidak hanya menuntut hak tanpa menunaikan kewajiban, menjadi fondasi etika politik Islam yang menolak otoritarianisme.

Relevansi hadis-hadis tersebut semakin nyata dalam konteks kepemimpinan modern, di mana penyalahgunaan kekuasaan dan sikap represif masih menjadi tantangan serius. Islam menawarkan prinsip kepemimpinan yang menyeimbangkan antara hak dan kewajiban, serta menekankan akuntabilitas pemimpin di hadapan Allah SWT. Dengan menjadikan hadis-hadis ini sebagai pedoman, kepemimpinan dapat diarahkan untuk bersifat adil, amanah, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

## Daftar Pustaka

- Ad-Dumaji, A. U. (1992). *Al-Imamah al-'Uzhma 'inda Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*. Riyadh: Dar al-'Asimah.
- Al-Shaybani, M. H. (1980). *Kitab al-Athar*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- At-Tirmidhi, I. M. (2005). *Sunan at-Tirmidhi*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif.
- Chaliddin, C., & Khalil, M. (2023). The importance of trust and deliberation in leadership from a hadith perspective. *Siyasah Wa Qanuniah: Jurnal Ilmiah Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif*, 3(1), 33–48.
- Ishak, N., Ismail, L., & Sakka, A. R. (2024). Trustworthy leaders in the thematic hadith perspective: An ideal concept for Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 11(1), 72–83. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v11i1.49728>

- Kuntari, A. D., & Nur Ihsan, M. (2023). Pengaruh figur pemimpin ideal terhadap stabilitas sosial masyarakat: (Studi analisis dalam Kitab Sahih Muslim Bab Siyasah Imaroh). *AL-ATSAR: Jurnal Ilmu Hadits*, 1(2), 109–124.
- Muslim, I. (2006). *Sahih Muslim* (Vol. 3). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Prayogo, A., Siregar, M. N., & Zalukhu, S. (2023). Politik Islam kontemporer: Analisis hadis tentang pemimpin pelindung rakyat. *Imtiyaz: Jurnal Ilmu Keislaman*, 7(2), 215–230.
- Sugitanata, A. (2024). Urgensi pemilihan pemimpin beretika dalam perspektif maqashid syariah menuju tatanan sosial dan politik yang sehat. *Jurnal Multidisiplin Ibrahimy*, 1(2), 201–220.
- Sumadiyah, S., & Damanhuri, D. (2023). Leadership justice: Analysis of the quality of hadith, concept and implementation in the context of modern leadership. *Al-Afkar: Journal For Islamic Studies*, 7(2), 145–160.